

STRATEGI MEMBANGUN MODEL PELAYANAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT MELALUI WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT (WKSBM) DI YOGYAKARTA

Dasuki

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mencermati tumbuhnya sarana partisipasi masyarakat berupa model pelayanan sosial berbasis masyarakat melalui WKSBM sebagai salah satu program pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka untuk mengatasi meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tingkat lokal wilayah.

Model pelayanan sosial ini merupakan refleksi program Departemen Sosial RI, dalam mengakses pemberdayaan penduduk lokal dengan meletakkan kembali elemen modal sosial, kearifan lokal, sistem jaringan keperangkatan pelayanan sosial dengan mendorong pengarusutamaan manajemen jaringan berbasis komunitas lokal. Strateginya adalah dengan cara menghimpun potensi daya dan dana masyarakat untuk, oleh, dan dari masyarakatnya sendiri. Kemudian disalurkan melalui santunan kepada PMKS seperti keluarga miskin, anak yatim, jompo, pinjaman modal usaha produktif, sumbangan kematian, dan lain-lain.

Strategi ini juga merupakan investasi sosial yang bertujuan membangun model pelayanan sosial berbasis masyarakat yang telah digulirkan pelaksanaannya melalui WKSBM-WKSBM di beberapa lokasi di Yogyakarta, diantaranya sudah menunjukkan hasilnya yang patut mendapat perhatian untuk dikaji lebih lanjut agar dapat dikembangkan pada daerah lain. Untuk mengetahui sejauhmana hasil yang telah dicapai dengan ini kami laksanakan penelitian dari salah satu WKSBM yakni "Warga Rukun" Kelurahan Surosutan Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan suatu kota didukung oleh sebuah ekosistem, sosial dan ekonomi yang dinamis dan kompleks, tempat bertemunya berbagai aktifitas (perindustrian atau home industri, perdagangan dan jasa atau pasar, dan lain sebagainya), dan menimbulkan dampak dalam wujud pertumbuhan sebagai sistem pola kehidupan masyarakat yang menggambarkan keragaman eksistensi perkembangan dari suatu kota yang secara konsisten sebanding dengan dinamika perkembangan budayanya. Sementara pengaruh meningkatnya harga minyak dunia, diiringi meningkatnya harga-harga kebutuhan dasar kehidupan keluarga hingga masyarakat, membawa beban dalam mengatasi kesulitan hidup yang akibatnya berdampak dengan meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Menurut data jumlah PMKS Tahun 2004 di 30 Provinsi di Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI memberikan gambaran umum tentang kondisi dan per-masalahan kesejahteraan sosial. Adapun pada Provinsi DIY dari 27 jenis PMKS diantaranya data keluarga fakir miskin berjumlah 261.320 jiwa. Meningkatnya pertumbuhan daerah dengan segala implikasi terhadap penduduknya mempunyai pengaruh yang pada akhirnya berdampak dengan meningkatnya jumlah PMKS.

Pemerintah menyadari akan hal demikian. Dengan diberlakukan otonomi daerah, berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah ditempuh pemerintah melalui program bimbingan bantuan dana dan penyediaan fasilitas yang diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan, partisipasi dan swadaya masyarakat pedesaan/kelurahan dalam proses pembangunan. Di antaranya program Bandes

(Bantuan Desa), IDT, Bantuan Langsung Tunai(BLT), namun belum mampu mengentaskan kemiskinan masyarakat desa/kelurahan secara optimal.

Sementara itu salah satu program pemerintah DIY, yaitu membangun investasi sosial dengan strategi membangun model pelayanan sosial berbasis masyarakat lokal, dengan cara berpikir global, bertindak lokal terhadap masalah dan dampak sosial yang timbul untuk menghantar meningkatnya jumlah PMKS. Proses mengglobal dan melokal tidaklah dipandang sebagai penyakit atau kelainan dalam budaya masyarakat, tetapi mesti diterima sebagai keutamaan hidup manusia, dengan semakin mengglobal semakin rindu akan identitas lokalnya. Maka melalui gerak paradoks tersebut secara jeli tampak jelas dan bangkit, akan menguat dalam gerakan-gerakan warga masyarakat luas, termasuk dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya dengan cara membangun model-model pemberdayaan melalui pelayanan sosial yang berbasis masyarakat. Sehingga usaha pemecahannya diperlukan sinergi antar instansi terkait, dengan organisasi masyarakat lokal.

Landasan strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi ; hak azasi manusia, komitmen global, pelestarian lingkungan, integritas sosial, nilai-nilai kearifan lokal dari daerah itu. Bilamana kita akan membangun suatu model pelayanan sosial di lingkungannya, mesti dengan cara mengakses pemberdayaan penduduk lokal yaitu dengan meletakkan kembali elemen modal sosial, kearifan lokal, melalui sistem jaringan keperangkatkan pelayanan sosial dengan mendorong pengarusutamaan manajemen jaringan berbasis lokal. Mewujudkan suatu wadah organisasi sosial berbasis masyarakat disebut dengan WKSMB. Hasil penelitian dari pelaksanaan kegiatan telah mewujudkan potensi daya dan dana masyarakat untuk, oleh, dan dari masyarakatnya sendiri di wilayahnya dalam mengatasi permasalahan sosialnya.

Model pelayanan sosial tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya arus kepedulian dalam mengimplementasikan pendekatan dan sistem pembangunan berwawasan pemberdayaan global dengan mengikutsertakan seluruh warga masyarakat.

Dalam pada itu disatu pihak kegiatan pembangunan oleh pemerintah membawa dampak kepada masyarakat semakin tergantung pada input pembangunan dari pemerintah. Akibatnya masyarakat kurang yakin dan percaya diri akan potensi sendiri dan tidak kreatif bahkan mematikan inovasi pembangunan. Namun di lain pihak, Agenda 21 yang merupakan komitmen dunia terhadap pembangunan berpusat pada manusia (*the centered people development*), dengan mengembangkan konsep berpikir global bertindak lokal, dengan adanya keharusan bagi otoritas lokal memberikan prioritas berpartisipasi dalam pembangunan bagi organisasi warga masyarakat lokal, guna menumbuhkan kegiatan pembangunan dari arus bawah oleh masyarakat untuk masyarakat.

Dengan digulirkan WKSMB, pendekatan pembangunan secara mengglobal mulai terserap, wacana program tersebut mulai bergulir dan bergerak menyadarkan para pelaksana penyelenggara negara, melalui kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan demokratisasi dan hak azasi manusia yang dimulai dari warga masyarakat sebagai akar rumput. Dengan kata lain, wacana *civil society* dibangun dan dikembangkan oleh, untuk, dan dari mereka.

WKSMB melakukan pelayanan sosial dengan pola yang sangat sederhana dan alami sampai pada perkembangan administrasi yang baik dan resmi. Usaha pelayanan kesejahteraan sosial pada umumnya dilaksanakan berdasarkan sistem *Community Base Organization*(CBO) yang ditujukan pada individu, keluarga maupun kelompok yang dikelola warga masyarakatnya.

Keberadaan WKSMB merupakan potensi sekaligus media masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan ditingkat komunitasnya, atas dasar wilayah pada administrasi kewilayahan lokal seperti RT/RW, desa, kampung, kelurahan, negari, jorong dan sejenisnya. Secara logis, bilamana semakin banyak bentuk WKSMB oleh dan dari dalam masyarakat, mengakibatkan akan semakin ringan beban masyarakat luas maupun pemerintah dalam memikul tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa peran WKSMB sangat potensial dalam pembangunan masyarakat,

sesuai dengan visi kesejahteraan sosial yang mengetengahkan kesejahteraan sosial berbasis kekuatan dan kearifan masyarakat lokal.

B. Tujuan Penelitian

Pelayanan Sosial melalui pelbagai organisasi lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kegiatan bimbingan sosial masyarakat diarahkan untuk mewujudkan:

- a. Pemahaman tentang kondisi objektif masyarakat di lingkungannya;
- b. Partisipasi masyarakat terhadap PMKS;
- c. Perencanaan dan pemberdayaan masyarakat lokal;
- d. Pembinaan jalur komunikasi antar warga dan kelompok masyarakat setempat;

Lahirnya konsep proses pelayanan sosial berbasis masyarakat ini pada umumnya merupakan upaya penguatan ikatan warga masyarakat sebagai suatu sistem, penegakan struktur dan fungsi masyarakat, pengembangan pelayanan sosial dalam konteks memperkecil krisis sosial; dan pembudayaan komunikasi antar warga komunitas, serta pemberdayaan usaha ekonomis produktif masyarakat lokal.

Dengan demikian, anggota masyarakat telah memikirkan secara global dan bertindak lokal terhadap pengembangan keharusan otoritas masyarakat lokal sebagai wahana partisipasi warga untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam pembangunan masyarakat, maka peranan WKSBM dalam wujudnya melalui (KPS) Kelompok Panti Sosial, berupa persatuan, penguyuban, arisan, perserikatan sosial dan lain-lain, yang tumbuh dan berkembang diseluruh lapisan masyarakat perlu dipertimbangkan sebagai instrumen dan strategi dalam pelayan sosial dilingkungannya, serta sebagai investasi sosial masyarakat.

Atas fenomena tersebut penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan *profile* karakter WKSBM; yang meliputi aspek organisasi, kegiatan dan jaringan kerja dengan semua perannya dalam membangun warga masyarakatnya.

2. Mengetahui bukti keberadaan WKSBM dapat menumbuhkan pemberdayaan dalam meningkatkan kesetiakawanan, kegotong-royongan, kepedulian atas kesejahteraan warga dan lingkungannya bagi yang membutuhkan bantuan dalam kegiatan sektor ekonomi produksi.
3. Menggambarkan karakter WKSBM yang berhasil, sebagai suatu strategi membangun model pelayanan sosial berbasis masyarakat dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak sosial dari meningkatnya jumlah PMKS di wilayah tersebut.

II. KERANGKA KONSEP

Sejak tahun 2002 pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi DIY telah memfasilitasi keberadaan WKSBM sebagai uji coba terhadap 10 lokasi dengan rincian 5 lokasi untuk Kota Yogyakarta, dan 5 lokasi lagi pada Kabupaten Gunung Kidul. Sistem mekanisme kerja dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh masyarakat tersebut melalui mekanisme kerja WKSBM yang dibangun dan dikembangkan secara alamiah lewat pertemuan dan musyawarah oleh warga masyarakat setempat, yang berbasis dari berbagai KPS yang berlandaskan kepentingan. Seperti latar keagamaan, kedaerahan, dan kekerabatan merupakan wadah yang dibangun dan dipelihara untuk menghantar masalah kesejahteraan sosial warga bagi yang membutuhkan bantuan di lingkungan kelompok wilayahnya.

WKSBM "Warga Rukun" 08 Sorosutan terdiri dari RT; 27,28,29,30,31 yaitu mereka terdiri dari komponen kelompok sosial pengajian, kelompok sembahyang (do'a bersama), kelompok pemuda, kelompok pengurus pemakaman serta kelompok keamanan, yang meleburkan diri dalam kebersamaan. Secara bertahap telah membuktikan kegiatannya dalam bentuk pelayanan sosial warga masyarakat dan cukup berhasil di wilayahnya.

Pelayanan sosial yang dilakukan oleh WKSBM "Warga Rukun" merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem mekanisme pemberdayaan masyarakat yang memiliki posisi strategis dalam mendukung dan

menggerakkan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayahnya tanpa turut campur pemerintah. Pemerintah hanya merupakan fasilitator dari keberadaan dan pengembangannya, oleh karena itu perlu kiranya meletakkan kembali elemen modal sosial, kearifan lokal, dengan sistem jaringan keperawatan yang sudah ada di masyarakat.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa keberadaan WKSBM yang telah tumbuh berkembang di masyarakat lokal, merupakan strategi dalam membangun model pelayanan sosial sebagai upaya alternatif pemecahan PMKS di wilayahnya melalui konsep-konsep pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat; peningkatan kepedulian akan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat; penguatan sistem jaringan perangkat keperawatan sosial pada wadah WKSBM.

Konsep pemberdayaan warga masyarakat tersebut yaitu dengan meletakkan elemen modal sosial berupa nilai-nilai budaya gotong royong, tolong menolong, peduli dan arif bijaksana, santun dalam pergaulan, rendah hati dan menjunjung nilai-nilai budaya adat setempat, merupakan modal dasar dalam upaya menggerakkan semangat dan dorongan dalam pengentasan masalah-masalah sosial khususnya kemiskinan warga masyarakat di lingkungannya.

Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang kompleks dan multi dimensional yang menyangkut berbagai aspek ekonomi, sosial dan budaya. Memiliki dimensi fisik dan mental baik internal maupun eksternal dari wilayah lingkungannya. Lebih lagi kemiskinan dengan ketiadaan modal, rendahnya penghasilan serta kemelatan karena terbatasnya akses informasi, wawasan, daya dan prakarsa. Sementara itu konsep pemberdayaan untuk menanggulangi kemiskinan lokal telah melekat sejalan dalam program mekanisme kerja WKSBM.

Konsep pemberdayaan menurut Ginandjar Kartasmita (1996) merupakan upaya untuk membangun daya, dengan mendorong atau memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam mengembangkan potensi tersebut diperlukan program untuk membantu meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Sebagaimana diungkapkan pula oleh David

C. Korten (1988) bahwa pemberdayaan (*empowering*) adalah pemberian kemampuan untuk mengelola berbagai sumber daya bagi kepentingan masyarakat.

Mengacu pada pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa WKSBM adalah media interaktif warga masyarakat dalam upaya membangun daya (kemampuan) warga masyarakat sendiri agar mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya melalui motivasi, bimbingan, dan pendampingan, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya sehingga menjadi kekuatan efektif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kesejahteraan sosial keluarga maupun masyarakat lokal.

Keluarga, menurut Horton dan Chester adalah suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan manusiawi lainnya. Keluarga melaksanakan fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi, perlindungan, dan ekonomis. Keluarga miskin hidupnya serba susah dan yang demikian tidak mampu melaksanakan salah satu fungsi potensi secara memadai. Oleh karena itu, mereka akan mensosialisasikan dan meneruskan pola ketidakmampuan dan ketergantungan tersebut pada anak-anaknya (Horton dan Chester, 1980). Dengan demikian permasalahan keluarga dilingkungannya pun akan menjadi acuan penanganan dari WKSBM.

Melalui keberadaan WKSBM dengan mengedepankan kearifan lokal merupakan model pelayanan sosial yang strategis dan efektif, dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

III. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran hasil yang dicapai dari keberadaan WKSBM sebagai suatu model pelayanan sosial yang berbasis masyarakat. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.

Adapun yang dijadikan sumber informasi, atau informan yang diwawancarai adalah semua komponen yang terlibat langsung dalam keberadaan dan kegiatan WKSBM, antara lain pengurus maupun anggota WKSBM, PSK, atau

pendamping atau pembina dan tokoh masyarakat maupun bu lurah yang disebut "key informan". Penentuan informan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan kepentingan tujuan penelitian. Dilaksanakan secara berturut-turut dari seorang informan kepada informan lainnya sehingga diperoleh ketuntasan. Informasi diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan disamping wawancara juga observasi serta analisa dokumen yang ditujukan untuk mengumpulkan data penunjang yang dapat mendukung data yang telah ada. Analisis digunakan secara deskriptif kualitatif yang mengacu pada aspek organisasi, kegiatan dan jaringan kerja

IV. HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa, WKSBM di daerah mempunyai profile dengan karakter sebagai berikut:

A. Bentuk WKSBM

WKSBM yang didirikan oleh masyarakat setempat pada lingkup wilayah tertentu (RT, RW, Dusun, Kampung, Desa/Kelurahan) merupakan unsur dari Kelompok Pranata Sosial (KPS), yang sudah ada di wilayahnya berdasarkan pembentukan kepentingan kelompok seperti majelis ta'lim/pengajian/yasinan, paguyuban warga, perkumpulan suku tertentu, perkumpulan remaja, perkumpulan adat, ikatan pemuda masjid, pemuda Katholik/Kristen, Pemuda Hindu/Budha, perkumpulan kematian, perkumpulan arisan, lembaga keuangan masyarakat, perkumpulan kesenian, perkumpulan olah raga, lembaga musyawarah adat, ikatan keluarga, ikatan suka duka, dana sehat dan organisasi. Pemberian nama pada WKSBM tersebut dengan menggunakan nama khas daerah dimana terdapat WKSBM, tanpa membedakan suku, agama dan kepentingan KPS tertentu. Dengan kegiatan memberikan santunan sosial terhadap keluarga tidak mampu dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah atau duka cita.

Cara pembentukan WKSBM ada dua, yaitu pertama, berdiri secara alamiah berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masya-

rakat sebagai KPS, seperti perkumpulan pengajian, keagamaan, ikatan keluarga, ikatan kesukuan dan marga, kelompok arisan, kelompok kesenian dan olah raga serta adat. WKSBM ini cenderung adaptif dengan kemampuan lokal, dengan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya lokal, tradisi dan kebiasaan, serta sumber daya lokal. Kedua, WKSBM yang pembentukannya diprakarsai oleh pemerintah. WKSBM ini merupakan kepanjangan tangan dalam membangun dibidang kesejahteraan sosial masyarakat lokal, yang akhirnya pun pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam upaya pemberdayaan masyarakat setelah mereka berdaya dalam mengatasi PMKS di lingkungannya.

B. Keanggotaan WKSBM

Keanggotaan WKSBM didasari atas kesepakatan dari hasil pemilihan anggotanya tanpa mendasari pada pendidikan tertentu, keterampilan, persamaan agama, keturunan, persamaan suku, persamaan pekerjaan, yang penting memiliki kepedulian sosial, persamaan kepentingan, domisili di wilayah tertentu (RT/RW/Desa/Kelurahan). Keanggotaan di dalam WKSBM pada umumnya bersifat sukarela, mempunyai hubungan interpersonal dan biasanya memiliki ikatan kekeluargaan.

Menjadi anggota WKSBM tidak sulit, biasanya melalui informasi dari keluarga, teman, atau orang lain. Cara menjadi anggota biasanya langsung bergabung saja, ada yang mendaftar secara lisan dan ada pula yang harus mendaftarkan diri secara tertulis melalui formulir yang disediakan. Hak dan kewajiban anggota biasanya sudah dirumuskan dalam rapat-rapat WKSBM dalam bentuk kesepakatan lisan maupun tertulis. Kesepakatan tertulis ini biasanya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hak dan kewajiban anggota WKSBM memiliki banyak persamaan antara lain hak untuk memperoleh pendidikan, mengikuti pengajian, memperoleh arisan, memperoleh bantuan sosial dan mengikuti setiap kegiatan perkumpulan. Sedangkan kewajiban anggota antara lain menghadiri pertemuan rutin, iuran wajib, iuran sukarela, mengikuti arisan wajib dan keharusan mengikuti kegiatan perkumpulan secara aktif.

C. Mekanisme kegiatan WKSBM

Pada umumnya mekanisme wilayah kegiatan WKSBM pada tingkat RT, RW, Dusun/Kampung dan Desa/Kelurahan. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari WKSBM, yang awal pendiriannya didasarkan pada tujuan memberikan pelayanan sosial dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat lokal.

Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan, ada diantara mereka yang sudah mampu mengembangkan jaringan kerja hingga sampai wilayah kecamatan, kabupaten/kota hingga luar wilayah. Sebagai contoh, perkumpulan arisan wujud dari salah satu KPS yang didirikan oleh kelompok masyarakat tertentu di beberapa tempat mekanisme kegiatan bisa sampai ke luar wilayahnya. Sedangkan tempat kegiatan dilaksanakan secara bergantian menurut kesepakatan anggotanya. Pihak luar maupun pemerintah tidak bisa memaksakan WKSBM memperluas kegiatan kerjanya, kalau memang komitmen para anggota menghendaki, maka dapat membentuk dan mengembangkan jejaring kerja dengan WKSBM lainnya, sehingga potensi yang ada pada mereka dapat disinergikan untuk kepentingan sebuah program yang luas dan dampaknya dapat menjangkau banyak orang sesuai dengan potensi yang dimiliki dari WKSBM tersebut.

D. Model Pelayanan Sosial WKSBM "Warga Rukun" Kelurahan Surosutan

Lurah adalah tokoh formal yang mengetahui kondisi warganya maka penempatan kepengurusan WKSBM dari peran serta ibu lurah Surosutan turut memfasilitasi, sehingga telah membangkitkan gerakan masyarakat sipil di wilayahnya melalui keberadaan WKSBM tersebut sebagai forum komunitas menjadikan sarana konsolidasi internal antar komunitas, menjadi wadah penyampaian keluh kesah warga sekaligus menjadi katup pengaman sosial dapat mencegah konflik-konflik sosial antar warga masyarakat secara individu maupun kelembagaan, sehingga WKSBM secara tidak langsung juga terlibat dalam proses pemerintahan lokal maupun turut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Keberadaan WKSBM sebagai model pelayanan sosial dalam Forum Komunitas (FK) adalah mengembangkan keperangkatan pelayanan sosial yang lebih akuntabel, transparan, keberpihakan pada kepentingan masyarakat dan memiliki daya tawar terhadap dominasi kekuasaan sekelompok orang atau elit tertentu. Dalam proses pembangunan, WKSBM tersebut mampu membangun hubungan atau jaringan sosial di antara kelompok-kelompok yang memiliki berbagai perbedaan kepentingan. WKSBM sebagai Forum Komunitas, juga mampu membangun kesetaraan antara kelompok-kelompok yang ada tersebut, aksesibilitas bagi mereka yang lemah seperti kelompok miskin, penyandang cacat, dan lain-lain, terutama mereka yang selama ini termarginalkan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

WKSBM Surosutan dibentuk dengan kepengurusan yang terdiri dari berbagai komponen, hasil pembentukannya adalah bersifat heterogen bukan homogen dan berdasarkan musyawarah mufakat para warga di RW 08. Surosutan, maka untuk kepengurusan WKSBM tersebut terdapat pengurus intinya adalah sbb:

1. Ketua : Bpk. FX. Medi
2. Wakil Ketua : Bpk. Supnasto Hadi Wijaya
3. Sekretaris I : Sdr. Agus Haryanto
4. Sekretaris II : Sdr. Widiyanto
5. Bendahara I : Bpk. FX. Budi Sanjaya
6. Bendahara II : Bpk. Hardiyono.

Dan dilengkapi anggota-anggota serta penasihatnya adalah Ketua RW dan Ketua RT setempat dengan sebutan nama WKSBM tersebut dimusyawarahkan bersama dengan nama "Warga Rukun" alamat Sekretariat di Jl. Sidokabul No. 41.E. Telp 388569. Yogyakarta. Setelah para pengurus mengadakan pertemuan model pelayanan sosial mereka tingkatkan dengan melakukan identifikasi dan menginventarisasi permasalahan sosial yang ada di RW 08. Surosutan adalah, sebagai berikut :

1. Anak putus sekolah
2. Lansia miskin

3. Korban kekerasan
4. Anak terlantar
5. Keluarga miskin
6. Korban narkoba
7. Keluarga bermasalah
8. Keluarga cacat
9. Rentan jalan (Anjal)
10. Kenakalan anak

Dari deretan permasalahan sosial yang ditemui di atas, maka untuk tingkat awal mereka melakukan pelayanan sosial dengan skala prioritas secepat untuk menangani lebih dahulu permasalahan Lansia miskin dan anak rentan putus sekolah

Sedangkan sumber dana yang diperoleh melalui : 1) Donatur tetap maupun insidental/spontan. 2) Para pengusaha setempat. 3) Sumbangan suka rela anggota pengurus. 4) Bantuan lainnya, baik Dinas Sosial maupun yang belum diketahui sumbernya nanti.

Para pengurus mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk membahas perkembangan sosial yang ada di lingkungannya, serta kegiatan lain yang perlu segera dilaksanakan. Pada akhirnya setiap 3 (tiga) bulan dapat memberikan pelayanan bantuan kepada 11 orang lansia menerima bantuan Rp.75.000,- berupa sembako Rp.40.000,- dan uang tunai Rp.35.000,- dan 11 orang untuk SPP anak putus sekolah tingkat SD diberikan secara langsung di masing-masing sekolahnya.

Rencana strategi kegiatan berikutnya mengadakan inventarisasi warga masyarakatnya, dan berhasil menjangkit 70 orang calon donatur setiap bulan membantu dana sehingga terkumpul Rp.600.000,- Rp.700.000,- yang diiringi dengan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa kartu donatur, laporan tertulis berkala serta identitas kartu keanggotaan yang dilaksanakan secara administrasi dengan baik dan akuntabel. Seiring dengan peningkatan jumlah penanganan permasalahan sosial menjadi 25 orang anak terlantar dan 18 orang lansia. Sumber dana dari masing-masing KPS setiap bulan bantuan terkumpul, dan bergulir setelah ada musyawarah kesepakatan

pengurus untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan bantuan.

E. Strategi Model Pelayanan Sosial WKSBM "Warga Rukun" Kelurahan Surosutan

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua WKSBM "Warga Rukun" Bapak Fx. Medi dalam pengembangan WKSBM diperoleh kejelasan strategi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial dalam operasionalisasi melalui musyawarah. Mereka merumuskan langkah kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi berbagai sumber yang dapat dijadikan relasi WKSBM bagi mereka.
- b. Penyusunan dan perumusan berbagai gagasan maupun program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan warganya. Maksudnya kegiatan diperkirakan bisa menjadi alat tawar dan diterima oleh pemilik sumber.
- c. Menginventarisasi dan memetakan pihak-pihak potensial yang memiliki sumber daya dan dana untuk mendukung program kegiatan WKSBM.
- d. Penataan dalam penginstitution WKSBM terwujud melalui sistem mekanisme sosial alamiah dengan uraian menggambarkan rincian tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang terlibat, tetapi terpadu dalam gerak satu tim koordinasi.
- e. Rumusan program kegiatan merupakan produk kesepakatan dalam musyawarah pengurus dan anggota yang dilaksanakan secara terarah, terencana dan berkelanjutan dibawah tanggung jawab satuan koordinasi (manajemen jaringan berbasis lokal).
- f. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan frekwensi 3 bulan sekali sesuai dengan intensitas kebutuhannya.

Dari pembahasan langkah kegiatan tersebut dapat kami sajikan analisis bagan sebagai aspek masukan alur kegiatan berupa pengarusutamaan manajemen jejaring kerja WKSBM sebagai berikut:

TABEL ALUR KEGIATAN JEJARING KERJA WKSBM

| MASUKAN | PROSES | KELUARAN | DAMPAK | HASIL |
|---|--|---|--|--|
| Modal sosial 1.Kebersamaan 2.Komitmen 3.Sistem nilai 4.KPS 5.Jaringan kerja Kearifan sosial 1.Kebijakan lokal 2.Nilai budaya 3.Iptek lokal 4.Sumber daya dan dana 5.Mekanisme kerja lokal Inisiator 1.Pengurus 2.Dukungan pemuka masyarakat lokal. 3.Instansi, pemda dan LSM/dunia usaha dll. | Mekanisme sosial lokal 1.Pertemuan rutin dan musyawarah. 2.Identifikasi masalah sosial. 3.Melibatkan semua anggota. 4.Melibatkan KPS-KPS 5.Prioritas pengentasan masalah. Transparasi kegiatan 1.Keterpaduan program kegiatan. 2.Keajegan laporan kegiatan. 3.Koord.sinergis 4.Tertib administrasi dan keuangan. | 1.Peningkatan perkembangan WKSBM. 2.Terstrukturanya mekanisme kerja sosial. 3.Melembaganya sistem jaringan manajemen lokal. 4.Wadah pengkajian strategis kasus sosial. 5.Pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial. | 1.Berkurangnya masalah sosial. 2.Melekatnya rasa solidaritas lokal. 3.Terarahnya manfaat sumber daya dan dana masyarakat Lokal. 4.Membantu pemerintah dalam UKS. 5.Terhindar konflik sosial. | 1.Meningkatnya solidaritas sosial. 2.Meningkatnya kesadaran kolektif. 3.Meningkatnya kegotong-royongan persaudaraan. 4.Mempererat nilai-nilai sosial budaya dan kemanusiaan. 5.Terentasnya masalah sosial lokal. |

Alur kegiatan tersebut merupakan kondisi ideal bagi suatu organisasi lokal di tingkat desa atau kelurahan dalam proses pelayanan yang disesuaikan fenomena objektif, bagi tingkat WKSBM setempat yang sebanding dengan kebutuhan keperangkatan pelayanan sosial bagi warganya. Iklim organisasi yang penuh kooperatif, pengarusutamaan manajemen jejaring kerja yang akuntabel dan transparan, telah lama diwujudkan dalam bakti kegiatan operasional WKSBM tersebut, sehingga kiprah kegiatannya pernah diliput dan diangkat dalam koran Bernas Jogja tgl 31 Agustus 2005.

F. Dampak keberadaan WKSBM

Keberadaan WKSBM "Warga Rukun" Kelurahan Surosutan memiliki berbagai dampak, baik bagi anggota WKSBM dan warga masyarakat di lingkungannya, maupun bagi pemerintah lokal sebagai berikut :

1) Keberadaan WKSBM bagi Anggotanya

Kegiatan pelayanan sosial yang telah berjalan membawa dampak positif bagi anggota warga masyarakat lokal dalam upaya membantu untuk mengatasi berbagai persoalan maupun kebutuhan hidup mereka. Upaya pelayanan sosial berupa penanganan dan pengentasan masalah sosial sebagai akibat dari dampak meningkatnya jumlah penduduk kemiskinan serta pemberdayaan warga masyarakat dalam usaha ekonomi produktif melalui usaha bersama kegiatan kelompok ataupun bentuk kegiatan KUBE

sebagai anggota mengikuti semua kegiatan kelompok, mereka mendapatkan hasil dari kegiatan ekonomis produktif seperti kulakan kecil-kecilan, gerakan simpan pinjam, atau sebagai anggota mereka mendapat penghasilan tambahan.

Dengan demikian keberadaan WKSBM secara umum telah berhasil meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya walaupun secara kualitas tidak begitu besar jumlahnya. Namun yang paling mendasar dirasakan, mereka memiliki kebersamaan dalam mengatasi persoalan anggotanya terkait upaya tambahan penghasilan.

Dampak sosial psikologis keberadaan WKSBM "Warga Rukun" Kelurahan Surosutan meningkatnya semangat kebersamaan dan kegotong-royongan sesama anggotanya. Hal tersebut sangat dirasakan yang dapat ditunjukkan melalui kegiatan upaya pengentasan kemiskinan warga dan kepedulian terhadap masalah sosial lain seperti bantuan terhadap anak yatim, fakir miskin dan orang jompo dan lain-lain.

2) Keberadaan WKSBM bagi masyarakat di sekitarnya

Tumbuh dan kembangnya WKSBM "Warga Rukun" Kelurahan Surosutan berpengaruh pada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan WKSBM mampu menghidupkan kembali rasa

kebersamaan, kolektifitas, keperluan dan kerjasama serta gotong royong dikalangan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya perhatian kepentingan KPS yang tergabung dalam penambahan sumbangan dana untuk bantuan terhadap keluarga miskin, jompo terlantar maupun kegiatan simpan pinjam. Selain itu WKSBM mempunyai kemampuan jangkauan pelayanan yang besar, memberikan bantuan bukan saja terhadap anggotanya bahkan keperluan terhadap warga masyarakat di sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan yang lebih luas.

3) Keberadaan WKSBM bagi Otonomi Pemerintah Setempat

WKSBM sebagai Forum Komunitas warga telah dapat melaksanakan fungsi fasilitasi, advokasi dan pemberdayaan pada masyarakat, yang mana fungsi-fungsi tersebut tidak lagi diperankan oleh pemerintah terutama di dalam pengambilan keputusan maupun kemampuan untuk mengakses sumber daya dan dana serta informasi.

Dalam perspektif pekerjaan sosial, dikemukakan oleh Attison (Rustanto, 2003), bahwa Forum merupakan salah satu pendekatan dalam intervensi komunitas atau disebut sebagai pendekatan kelompok komunitas (*community group approaches*). Pendekatan ini digunakan oleh pekerja sosial untuk menggali persepsi dan aspirasi komunitas.

Di dalam WKSBM ini, dikembangkan metode dan teknik penguatan masyarakat, antara lain melalui pertemuan terbuka dimana semua warga mengemukakan pemikirannya tentang isu strategis khususnya dalam permasalahan sosial yang dihadapi untuk diantisipasi. Dengan demikian beban dan tanggung jawab sosial dapat diatasi oleh dan untuk warga masyarakat sendiri. Selain itu, adanya keharusan bagi otoritas lokal memberikan prioritas berpartisipasi bagi WKSBM dalam pembangunan warga masyarakatnya.

G. Manfaat WKSBM sebagai Model Pelayanan Sosial Masyarakat

Peranan WKSBM dalam bidang pelayanan sosial memberikan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dengan kegiatan pemberdayaan warga masyarakat secara swadaya mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapinya, baik bidang ekonomis, sosial psikologis, budaya, dan politik. Berbagai peranan WKSBM tersebut dapat dipetik manfaat untuk anggota, masyarakat lingkungan serta pemerintah tingkat desa/kelurahan ditinjau dari aspek; ekonomi, sosial psikologis, sosial budaya dan sosial politik sebagai berikut;

- 1) Manfaat ekonomi. Keberadaan WKSBM mampu meningkatkan dan menciptakan pemberdayaan secara ekonomi bagi anggota maupun masyarakat di lingkungannya serta pengentasan PMKS dan penyantunan program ekonomi produktif. Dengan demikian ada kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial pada wilayah lokal.
- 2) Manfaat sosial psikologis. Peranan WKSBM mampu menciptakan suasana kebersamaan dan secara psikologis mampu meningkatkan rasa kegotongroyongan dalam mendukung kapasitas pembangunan warga masyarakatnya dengan mewujudkan kapasitas percaya diri akan potensi yang dimiliki. Aspek ini mempunyai kekuatan yang besar, dengan adanya kesadaran kolektif dalam menumbuhkan investasi sosial kelompok dilingkungannya.
- 3) Manfaat sosial budaya. Peranan WKSBM mampu membangkitkan kembali nilai-nilai sosial budaya yang masih berakar dalam jiwa masyarakat dalam menghambat pengaruh nilai-nilai perubahan dari luar yang merusak. Mampu pula menyeleksi sosial budaya secara proporsional berdasarkan pola interaksi yang menggambarkan persepsi penanganan masalah sosial mengacu pada nilai budaya lokal.

- 4) Manfaat sosial politik. Peranan WKSBM tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan aspek politik, tanpa mengurangi peran pemerintah. Forum Komunitas WKSBM, mampu membangun kesetaraan antara kelompok-kelompok, dan dapat memberikan aksesibilitas bagi mereka yang lemah seperti kelompok miskin, penyandang cacat, jompo terlantar dan lain-lain. Terutama mereka yang selama ini termarjinalkan dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Tumbuh dan kembangnya tergantung kepada pengarusutamaan manajemen peran pengurus dalam menangani kegiatannya.

H. Manfaat WKSBM dalam Pembangunan Masyarakat

Kontribusi WKSBM dalam pembangunan masyarakat pada kenyataan dapat dijumpai dalam hal yang sangat mendasar pada kegiatan pembangunan itu sendiri dalam wilayah lokal antara lain berupa :

1. Tersedianya informasi permasalahan dan kebutuhan warga masyarakat oleh WKSBM.
2. Tersedianya data tentang PMKS oleh WKSBM.
3. WKSBM sebagai mitra pemerintah dalam sosialisasi pembangunan desa/kelurahan
4. Mendorong dan mempercepat target pemberdayaan pembangunan masyarakat lokal.
5. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan warga masyarakat lokal dibidang kesejahteraan sosial.
6. Mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.
7. Mengentaskan permasalahan sosial PMKS lokal.

Kekuatan yang dimiliki dari keberadaan WKSBM yaitu memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjangkau pelayanan sosial di luar anggotanya. Hal ini akan membawa kesadaran positif dalam pembangunan masyarakat pada tingkat desa/kelurahan, sehingga WKSBM mampu pula memprakarsai secara nyata dalam kegiatan pembangunan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Yogyakarta tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. WKSBM sebagai suatu model pelayanan sosial berbasis masyarakat di lingkungannya, dibangun melalui pemberdayaan penduduk lokal, dengan cara meletakkan kembali elemen modal sosial, kearifan lokal, dan sistem jaringan keperangkatan pelayanan sosial dengan mendorong pengarusutamaan manajemen jaringan berbasis lokalitas.
2. WKSBM yang berhasil sangat potensial sebagai suatu strategi membangun model pelayanan sosial berbasis masyarakat, untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak sosial di tingkat lokal, khususnya membatasi jumlah PMKS.

B. Saran

1. Diperlukan adanya dukungan motivator dan fasilitas dari otoritas lokal (Kelurahan/ Camat/ Bupati/ Walikota) dalam memberikan prioritas berpartisipasi dalam pembangunan untuk organisasi warga masyarakat lokal.
2. Disarankan pada pemerintah daerah untuk mewujudkan pembentukan WKSBM-WKSBM di seluruh wilayah propinsi di Indonesia sesuai dengan karakter daerah masing-masing, utamanya dalam mengatasi peningkatan jumlah PMKS secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial RI. 1996. *Program Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera Repelita VI*, Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial; Jakarta.
- Direktorat Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin, 2000, *Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama (Prokesos KUBE)*, Jakarta; BKSNI.
- Etty Padmiati, 2004, *Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Studi Kasus di Desa Pulung Merdiko)* Jurnal Peneliti dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Jakarta; Departemen Sosial RI.
- Koentjaraningrat (1997), *Sistem Gotong Royong dan Jiwa Tolong Menolong*; Jakarta : Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Karten, David C (1985), *Pembangunan Berpusat Pada Rakyat*, Jakarta; Yayasan Ober Indonesia.
- Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2004. *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta; Departemen Sosial RI.
- Pranarka, AMW dan Vindyandika Moeljarto, 1984, *Pemberdayaan Konsep dan Implementasinya*, Jakarta; CSIS
- Nurdin Widodo dan Suradi, 2004, *Penelitian Peranan Organisasi Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat*, Jurnal Peneliti dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Jakarta; Departemen Sosial RI.

BIODATA PENULIS:

Dasuki, Sarjana Sosiologi UGM Yogyakarta, dan memperoleh gelar Magister Sosiologi dari Program Studi Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial UI Jakarta. Saat ini menjabat sebagai widyaiswara madya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Departemen Sosial RI.